

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Implementasi

Implementasi atau penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti proses, cara, perbuatan menerapkan; pemasangan; pemanfaatan; perihal mempraktikkan (Pustaka, 2009). Sesuai judul penelitian, implementasi dapat berarti bagaimana melaksanakan, menerapkan, mempraktikkan suatu konsep, rencana, rancangan, program maupun kebijakan Bela Negara untuk memperkuat Sishankamrata. Sehingga implementasi terhadap program Bela Negara menjadi hal yang sangat penting dalam Sistem Pertahanan Negara.

Menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang dikutip oleh Sinaga dkk (2014), menjelaskan bahwa, implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam pemerintah atau swasta untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, implementasi adalah pelaksanaan dari hasil kerja yang didapatkan melalui sebuah cara untuk dapat dipraktikkan dalam masyarakat (Sinaga et al., 2014). Kemudian Eriani (2016) dalam tesisnya mengatakan, implementasi adalah proses dinamis suatu kegiatan, dengan harapan hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan dari sasaran program atau kebijakan yang ditetapkan (Eriani, 2016).

Berikutnya Riant Nugroho (2003) mengatakan, bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar tujuan dari kebijakan yang dibuat tercapai sesuai keinginan. Dimana dapat langsung diterapkan dalam bentuk program atau memerlukan peraturan pelaksana untuk menerapkannya. Kemudian disebutkan model implementasi kebijakan publik paling efektif adalah yang partisipatif, kombinasi *top down* dan *bottom upper*. Seperti halnya kebijakan pertahanan negara

dengan sistem yang bersifat semesta, menghendaki kerjasama antara militer dengan rakyat (Nugroho, 2003).

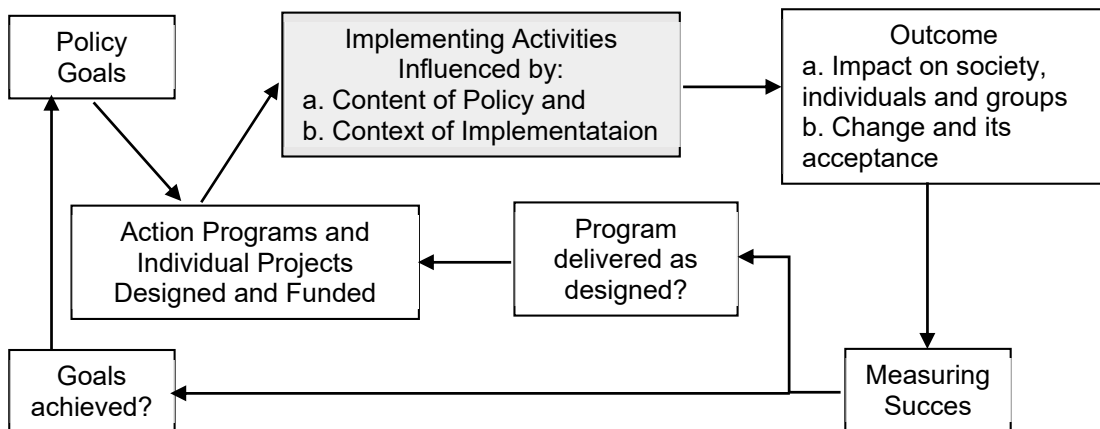
Kemudian, Ali (2021) melansir apa yang dikatakan oleh Rohman dan menuliskan implementasi adalah aktivitas yang bertujuan untuk menjalankan sebuah program. Lebih lanjut disebutkan ada tiga kegiatan pokok yang dilakukan untuk menjalankan program tersebut, yaitu, pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Selanjutnya dikatakan ada tiga faktor penentu keberhasilan atau ketidak berhasilan dalam implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Rumusan kebijakan, yang mencakup kejelasan kalimat pada rumusan, tepat atau tidaknya tujuan kebijakan, mudah atau tidaknya untuk dipahami dan diinterpretasikan serta tingkat kesulitan pelaksanaan, terlalu sulit atau tidak.
- b. Pelaksana kebijakan, mencakup kompetensi terkait tingkat pendidikan dan pengalaman, motivasi, komitmen, kinerja serta kemampuan bekerjasama.
- c. Organisasi pelaksana adalah berkaitan dengan jaringan sistem, hirarki kewenangan, pendistribusian tugas, kepemimpinan, target kegiatan sesuai yang ditetapkan, monitoring serta evaluasi (Ali, 2021).

Grindle (2017), dalam buku *Politics and Policy Implementation in the Third World* pada tulisannya bagian kesatu yang berjudul *Policy Content and Context in Implementation*, mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah cara untuk membangun suatu jaringan yang memungkinkan terwujudnya tujuan kebijakan tersebut. Kemudian disebutkan bahwa implementasi kebijakan merupakan fungsi dari implementasi program, yang berarti dalam melaksanakan suatu kebijakan dilakukan melalui implementasi berbagai program untuk merespon pencapaian tujuan dari kebijakan. Selanjutnya Grindle mengatakan keberhasilan kegiatan implementasi program dipengaruhi oleh dua variabel utama yaitu isi

kebijakan (*policy content*) dan pelaksanaan penerapannya melalui program (*context in implementation*) (Grindle, 2017).

Secara garis besar model implementasi Grindel, menjelaskan tentang implementasi sebagai proses politik dan administrasi seperti gambar di bawah ini:



Gambar 2.1 Implementasi sebagai proses

Dimana terkait keberhasilan aktivitas implementasi dipengaruhi dua variabel utama sesuai dengan cakupan masing-masing. Variabel pertama adalah isi kebijakan (*content of policy*) mencakup enam hal, pertama adalah kepentingan yang terpengaruhi (*interest affected*). Kedua, Jenis manfaat yang diperoleh oleh sasaran atau target (*type of benefits*), Ketiga, derajat perubahan yang diharapkan (*extent of change envisioned*). Keempat, kedudukan pembuat keputusan (*site of decision making*). Kelima, pelaksana program (*program implementors*) dan Keenam, komitmen akan sumber daya (*resources commitment*). Sedangkan variabel kedua adalah yang terkait/ ada hubungannya dengan pelaksanaan penerapan (*context of implementation*) mencakup tiga hal, yang pertama, kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor yang terlibat (*power, interests, and strategies of actors involved*). Kedua, karakteristik dari institusi dan rezim (*institution and regime characteristics*). Ketiga kaptuhan dan tanggapan dari sasaran (*compliance and responsiveness*).

Penjelasan tentang elemen-elemen model implementasi Grindle pada variabel isi kebijakan sebagai berikut:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi (*interest affected*), dimana kepentingan dari sasaran atau target dapat dipengaruhi oleh isi atau rumusan kebijakan. Dengan kata lain, kepentingan yang ingin diwadahi tertuang dalam isi kebijakan. Menurut ketentuan umum dalam Peraturan Pemerintah N0 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, mengatakan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Pemerintah RI, 2021). Dimana kepentingan atau kebutuhan bangsa, negara dan masyarakat akan Bela Negara dinyatakan dan diselenggarakan oleh pemerintah untuk diwujudkan. Program Bela Negara juga dibuat untuk melaksanakan amanat dari kebijakan di atasnya.
- b. Jenis manfaat yang diperoleh oleh sasaran atau target (*type of benefits*) adalah mudah dipahami serta akses yang mudah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sehingga bisa diaplikasikan untuk memperoleh manfaat yang diinginkan. Menurut Gusni dkk (2020), menulis apa yang dikatakan oleh Davis (1989) bahwa persepsi kebermanfaatn merupakan prediksi atau pandangan subjektif pengguna terhadap manfaat sebuah sistem (Gusni dkk, 2020). Dimana diharapkan program Bela Negara dipandang/ dipahami sebagai hal yang bermanfaat untuk Sishankamrata, maka akan dilaksanakan dengan kesadaran bukan paksaan.
- c. Derajat perubahan yang diharapkan (*extent of change envisioned*), mencakup bagaimana peningkatan pemahaman terhadap Bela Negara. Meningkatnya antusiasme masyarakat

dalam mengikuti sosialisasi, seminar maupun pendidikan dan latihan Bela Negara yang dilaksanakan. Dimana kemudian indikator-indikator dalam kehidupan masyarakat akan menunjukkan berkurangnya fenomena-fenomena yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Bela Negara. Oleh sebab itu diperlukan konsep pemantauan yang komprehensif untuk melihat derajat/ tingkat perubahan yang terjadi.

- d. Kedudukan pembuat keputusan (*site of decision making*), adalah sebagai yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program. Sesuai dengan Permenhan No 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara pada pasal 4 disebutkan ada empat pelaksana PKBN. Dimana harus dijelaskan secara rinci untuk mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam pelaksanaan program Bela Negara.
- e. Pelaksana program (*program implementors*) merupakan bagian penting untuk dapat melaksanakan program Bela Negara yang sudah ditetapkan. Pelaksana program harus mempunyai kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya. Kompetensi merupakan faktor penentu seorang pekerja dalam menghasilkan hasil kerja yang baik dan dalam lingkup kelompok/ bersama, kompetensi menjadi penentu keberhasilan suatu organisasi (Hertanto, 2017). Selanjutnya menurut Wirawan (2009) yang dikutip oleh Hertanto, kompetensi adalah karakteristik pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan pengalaman seorang pekerja/ pegawai sesuai pekerjaannya secara efektif. Para pelaksana program Bela Negara dalam lingkup Direktorat Bela Negara harus memiliki kompetensi yang baik agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya.
- f. Komitmen akan sumber daya (*resources commitment*), dimana pemenuhan akan sumber daya dilakukan secara memadai,

seperti anggaran, bahan/ materi, fasilitas pendukung, area atau lokasi pelaksanaan kegiatan Bela Negara.

Sedangkan pada variabel konteks implementasi, yaitu lingkup atau cakupan, yang terkait pelaksanaan implementasi sebagai berikut:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor yang terlibat (*power, interests, and strategies of actors involved*). Kekuasaan, kepentingan dan strategi adalah kondisi/ keberadaan yang melekat pada aktor yang terlibat pelaksanaan suatu kebijakan. Dengan kata lain penerapan suatu kebijakan dipengaruhi oleh kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor pembuat kebijakan. Menurut Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan yang dilansir oleh *Kompas.com* bahwa kekuasaan adalah jalinan hubungan antar individu atau kelompok dalam hal menentukan suatu tindakan bersama yang terarah (Putri, 2021). Sehingga bagaimana kekuasaan/ jaringan kekuasaan secara bersama-sama mengajak target atau sasaran untuk mau terlibat dalam program PKBN. Kemudian bagaimana kepentingan akan perlunya Bela Negara dapat menjadi pendorong yang kuat bagi aktor yang terlibat, seperti yang dikatakan oleh Ramlan Surbakti, bahwa kelompok kepentingan adalah orang-orang yang bersatu untuk mencapai tujuan bersama dengan kesamaan sifat sikap, kepercayaan atau tujuan (Ratna, 2016). Sehingga penerapan program Bela Negara akan terlaksana dengan adanya kesamaan kepentingan. Selanjutnya strategi yang baik adalah cara yang tepat bagi para aktor yang terlibat untuk menerapkan program Bela Negara.
- b. Karakteristik dari institusi dan rezim yang sedang berkuasa (*institution and regime characteristics*). Konteks implementasi ini menunjukkan bagaimana pandangan institusi atau

pemerintahan terhadap penerapan program Bela Negara. Apakah akan berlanjut atau tidak.

- c. Kepatuhan dan tanggapan (*compliance and responsiveness*). Dalam pelaksanaan penerapan kebijakan, sangat dibutuhkan kepatuhan dari target atau sasaran terhadap kebijakan, termasuk juga kepatuhan pelaksana program. Menurut Taylor dkk (2006), kepatuhan adalah bentuk dari respon/ tanggapan terhadap permintaan langsung dari pihak lain (Syaifullah & Ramdany, 2020). Chayes & chayes (1995) mengatakan bahwa ketaatan/ kepatuhan pada hukum bukan semata karena takut akan sanksi, tetapi lebih pada kekhawatiran hilangnya reputasi sebagai anggota masyarakat yang baik (Kristanto, 2020). Kemudian disebutkan juga instrument untuk mendorong terciptanya kepatuhan seperti transparansi, pelaporan, *dispute resolution* dan *capacity building*. Sehingga kepatuhan yang diharapkan dalam penerapan program Bela Negara adalah karena kesadaran yang didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang sesuai ketentuan melalui teladan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya perlu adanya respon atau tanggapan sebagai masukan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi adalah suatu aktivitas yang dilakukan individu atau kelompok. Dimana aktifitas tersebut dilakukan berdasarkan program atau kebijakan yang telah dibuat untuk mencapai tujuan sesuai program atau kebijakan tersebut. Dengan kata lain dapat dipahami, implementasi adalah bagaimana cara mempraktikkan suatu program atau kebijakan secara komprehensif untuk mencapai tujuan atau tahapan tujuan yang berkelanjutan. Dimana untuk keberhasilan suatu aktivitas implementasi dipengaruhi oleh bagaimana isi/ rumusan dari program atau kebijakan dan pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut.

Menurut Lykke (1989) yang dikutip oleh Hartanto (2021), ada tiga unsur dalam teori strategi yaitu *means*, *ways* dan *ends*. Dimana *means* adalah sarana untuk mencapai tujuan, *ways* adalah cara untuk mencapai tujuan dan *ends* adalah apa yang ingin di capai (tujuan) (Hartanto et al., 2021). Upaya Bela Negara melalui implementasi program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) adalah salah satu fungsi pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam pertahanan negara yang merupakan cara untuk mencapai tujuan (*ways*). Dimana dalam pasal 3, UU No 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, disebutkan bahwa tujuan kebijakan Pemerintah untuk Pertahanan Negara (*ends*) adalah mentransformasikan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional menjadi kekuatan Pertahanan Negara yang siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara. Dalam lingkup pendidikan, sarana (*ways*) yaitu segala aturan dan ketentuan yang komprehensif, anak-anak didik, pengajar, metode pengajaran, alat instruksi (*alins*) serta alat penolong instruksi (*alongins*), tempat pelaksanaan dan *stake holder* terkait.

Selanjutnya aplikasi strategi pelaksanaan Pertahanan Negara, sesuai dengan pasal 4 ayat (1) UU No 23 Tahun 2019, disebutkan bahwa pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dipersiapkan secara dini untuk menghadapi ancaman. Dimana tugas dan fungsi Kemhan sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan di bidang pertahanan, melaksanakan penyiapan secara dini terhadap ketiga unsur strategi tersebut untuk menghadapi segala jenis ancaman yang mengganggu kedaulatan NKRI..

2.1.2 Teori Perilaku Terencana (*Planned Behaviour*)

Teori ini disampaikan oleh Icek Ajzen pada tahun 1980 dan direvisi pada tahun 1985. Secara singkat Ajzen mengatakan, bahwa perilaku manusia dipandu oleh tiga jenis pertimbangan yaitu: keyakinan tentang kemungkinan konsekuensi dari perilaku atau keyakinan perilaku (*behavioral*

beliefs), keyakinan tentang harapan normatif orang lain atau keyakinan normatif (*normative beliefs*), dan keyakinan adanya faktor-faktor lain yang kedepannya mungkin dapat menghambat kinerja perilaku atau keyakinan kontrol (*control beliefs*). Kemudian disampaikan bahwa kontrol yang dirasakan atas kinerja suatu perilaku dapat menjelaskan perbedaan yang cukup besar dalam niat dan tindakan. Selanjutnya ambiguitas akan dapat menghambat kemajuan dalam kontrol atas kinerja perilaku tersebut. Semakin banyak faktor positif yang dimasukkan dalam sebuah program perilaku maka dominasi kearah positif akan lebih kuat yang membuat perilaku yang diinginkan akan dilakukan (Ajzen, 2002).

Mencermati teori perilaku terencana tersebut dapat disampaikan bahwa kekuatan keinginan/ kemauan seseorang dipengaruhi oleh teladan, norma-norma dan lingkungan (fungsi kontrol). Dalam hal seorang tokoh/ panutan/ pejabat melakukan hal positif atau teladan maka dapat memunculkan sikap yakin pada rakyat akan perilaku tersebut, sehingga akan melakukan seperti yang dicontohkan. Yang kedua adalah norma atau aturan yang dibuat, sebagai harapan untuk dapat mempengaruhi dan diikuti masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, dimana keyakinan diikuti karena lingkungan/ mayoritas sudah melakukannya, dimana adanya faktor-faktor lain yang kemudian muncul dapat menjadi fungsi kontrol. Dari segi norma/ ketentuan, pemerintah telah membuat, termasuk modul untuk pendidikan Bela Negara yang tentunya akan dilaksanakan. Yang menjadi sangat penting adalah bagaimana menimbulkan kepercayaan masyarakat bahwa Bela Negara sangat dibutuhkan. Teladan dari pemerintah dan penyelenggara Bela Negara perlu dipertajam, sesuai unsur pertama teori perilaku terencana tadi. Diharapkan dengan teladan dan melaksanakan ketentuan/ norma, maka program Bela Negara yang baik dan tepat akan menjadi kontrol perilaku.

2.1.3 Teori Identitas

KBBI menyebutkan bahwa identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang, jati diri orang tersebut. Penyebutan nama merupakan salah satu yang menunjukkan identitas seseorang, dimana nama mempunyai arti dan makna yang sangat penting. Nama, walaupun terkadang asal diberikan, tetapi kemudian menjadi sangat penting karena mewakili gambaran seseorang/ sesuatu. Nama dalam tataran Ilahi memiliki makna kemuliaan, doa, panggilan, dan permohonan (Sitopu, 2010).

Menurut Marcia (1993) menyatakan bahwa pembentukan identitas merupakan sintesis dari keterampilan, keyakinan, dan identifikasi masa kanak-kanak menjadi satu kesatuan yang koheren dan unik yang membentuk hubungan yang berkelanjutan dengan masa lalu dan mencapai arah tujuan untuk masa depan. *“Identity formation involves a synthesis of childhood skills, beliefs, and identification into a more or less coherent, unique whole that provides the young adult with both a sense of continuity with the past and a direction for the future”* (Marcia, 1993).

Selanjutnya Waterman (1984), mengatakan identitas berarti memiliki gambaran diri yang jelas meliputi sejumlah tujuan yang ingin dicapai, nilai, dan kepercayaan yang dipilih oleh individu tersebut. Komitmen-komitmen ini meningkat sepanjang waktu dan telah dibuat karena tujuan, nilai dan kepercayaan yang ingin dicapai, dinilai penting untuk memberikan arah, tujuan dan makna pada hidup (LeFrancois, 1993).

Manuel Castells, dengan teori identitasnya, khususnya bentuk ke-3 yaitu *Legitimizing identity*, mengatakan bahwa konstruksi makna atau thema, dibangun oleh pihak yang dominan untuk memperluas dominasi mereka. Selanjutnya dikatakan bahwa tujuan membangun konstruksi makna atau thema dalam alam pikir masyarakat, merupakan hakekat dari suatu pertarungan kekuasaan (Castells, 2010).

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa identitas adalah jati diri seseorang atau masyarakat yang terbentuk oleh proses yang dibuat untuk mendominasi alam pikiran atau pendapat orang tersebut atau

masyarakat sekitar dalam pencapaian suatu tujuan. Dominasi yang sudah tertanam dalam alam pikiran tersebut akan mempengaruhi pola tindak sesuai dengan identitas yang ingin dibentuk. Identitas ini kemudian akan dikenal secara lebih luas tergantung dari penyebaran dan pengaruh dari identitas itu sendiri.

2.1.4 Teori Karakter

Karakter, seperti yang didefinisikan oleh Soedarsono (2004) adalah nilai intrinsik yang mendasari sikap, perilaku dan pemikiran manusia yang merupakan perpaduan dari nilai eksternal dan internal. Eksternal didapat dari pendidikan, pengalaman, keterampilan dan lingkungan, sedangkan nilai-nilai internal yaitu bakat, kecerdasan dan temperamen adalah sifat genetik didapat dari keturunan. Nilai yang didapat dari sifat genetik menjadi bagian penting untuk dilakukan karena merupakan hal yang susah diubah (Soedarsono, 2004).

Menurut Mustoip (2018), secara umum karakter biasanya dikaitkan dengan watak, akhlak atau budi pekerti seseorang sebagai jati diri atau kekhasan kepribadiannya yang membedakannya dari orang lain. Kemudian dapat dikatakan bahwa, karakter merupakan kebiasaan seseorang sebagai gambaran dari jati dirinya. Selanjutnya mengutip apa yang dikatakan oleh Thomas Lickona, bahwa karakter adalah suatu nilai dalam tindakan yang dimulai dari kesadaran batin yang dapat diandalkan untuk menanggapi situasi dengan cara yang menurut moral baik. Dimana moral sangat berperan dalam membentuk karakter individu untuk menjadi berakhlak mulia dan berbudi luhur. Selanjutnya dikatakan ada tiga komponen paling mendasar dari karakter yaitu pengetahuan moral, perasaan moral dan tindakan moral (Mustoip et al., 2018). Tindakan moral adalah merupakan *output* dari dua komponen sebelumnya, sebagai perilaku contoh atau teladan untuk ditiru.

Zuriah dan Sunaryo (2020), menyebutkan bahwa Karakter adalah nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha

Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, dan kebangsaan dalam wujud pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Dimana dengan pendidikan karakter diharapkan akan tertanam nilai-nilai karakter dengan empat komponen yaitu pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan kepada semua pemangku (Zuriah & Sunaryo, 2020)

Sehingga dapat disimpulkan, inti dari karakter adalah tindakan moral dalam wujud pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan yang terbentuk dari faktor internal dan eksternal. Dimana akan menggambarkan "rangka jiwa" seseorang ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung akan menjadi contoh dan teladan berdampak dalam lingkungan sekitar. Selanjutnya tindakan moral tersebut terbentuk dari sifat genetik serta pengetahuan dan rasa tentang moral itu sendiri.

2.1.5 Teori Sistem

Sistem, menurut Heryana (2017) merupakan suatu pendekatan untuk memecahkan masalah dengan melihat masalah sebagai bagian dari suatu sistem dinamis yang lebih luas cakupannya. Kemudian seperti yang dikutip dari Ludwig von Bertalanfy, yang menyebutkan "*system is an entity that maintains its existence through the mutual interaction of its parts to achieve*". Yang dapat diartikan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang mempertahankan keberadaannya melalui hubungan mutual yang diperoleh antar elemen-elemennya (Heryana, 2017). Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat dipahami bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan secara mutual untuk mencapai tujuan tertentu.

Sementara itu menurut Priyono (2007), suatu sistem terbuka yang saling berhubungan dengan lingkungan sekitarnya akan mengubah *input* berupa sumber daya yang dimilikinya menjadi *ouput* hasil yang dapat berupa barang maupun jasa. Selanjutnya dijelaskan, *input* dianggap menjadi unsur terpenting dalam suatu sistem terbuka, dimana merupakan

tempat berasalnya sumber daya yang dibutuhkan dan juga tempat berasalnya *feedback* dari pengguna hasil atau output. *Feedback* kemudian dapat menjadi masukan bagi organisasi mengenai seberapa baik organisasi tersebut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Buruknya *feedback* dari pengguna yang diterima oleh suatu organisasi dapat menyulitkan organisasi untuk beroperasi atau bertahan di bidang usahanya dalam jangka panjang (Priyono, 2007). Sehingga dapat dimengerti bahwa *input* atau masukan adalah unsur terpenting dalam sebuah sistem terbuka yang menjadi tempat berasalnya sumber daya dan juga umpan balik dari pengguna hasil produk atau output sistem tersebut.

Menurut O'Brien dan Maraka (2011) dalam bukunya *Management Information System* ada tiga komponen dasar dalam sistem yaitu:

- a. *Input* atau masukan merupakan subsistem yang memberikan segala masukan yang mendukung untuk berfungsinya suatu sistem. Input adalah bagian yang terdapat dalam sistem yang berfungsi untuk menjalankan proses.
- b. *Process* merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengubah masukan dan menjadikannya sebagai sebuah hasil/keluaran yang diinginkan dari sistem tersebut.
- c. *Output* atau keluaran merupakan hasil yang diperoleh dari sebuah proses.

Sehingga sistem merupakan sekumpulan komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama melakukan tugas tertentu untuk mencapai tujuan (O'Brien and Maraka, 2011).

2.1.6 Bela Negara

Strategi pertahanan negara sesuai UU RI no 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah dengan menggunakan sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya (Indonesia, 2002). Sistem ini disebut Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), dengan

usaha Bela Negara menjadi fondasinya. Seperti yang tertuang dalam Kebijakan umum pertahanan negara (Jakumhaneg) tahun 2020-2024 pada bagian lampiran halaman sembilan, menyebutkan bahwa usaha Bela Negara merupakan fondasi Sishankamrata. Dimana sebagai tumpuan dibangunnya kemampuan daya tangkal dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman yang semakin kompleks dan multidimensi (Kemhan RI, 2021).

Pemerintah telah merumuskan usaha-usaha Bela Negara dalam sebuah Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN). Kemhan sebagai penyelenggara Pertahanan Negara telah menetapkan konsep Bela Negara secara komprehensif agar dapat diimplementasikan oleh segenap lapisan masyarakat. Sesuai dengan Modul PKBN seri ke-3 tentang Tataran Dasar Bela Negara, ada 5 (lima) nilai dasar Bela Negara yang perlu selalu dipantau secara melekat pelaksanaannya, yaitu cinta Tanah Air, sadar akan berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara (Kemhan RI, 2019c).

2.1.6.1 Cinta Tanah Air

Terdapat empat hal yang perlu dilakukan untuk terwujudnya cinta, yaitu, perhatian, tanggung jawab, hormat dan pengenalan/ pengetahuan. Yang mana keempatnya secara seimbang muncul dalam pribadi manusia. Cinta tidak hanya sebatas mengetahui/ mengenal dan dapat merasakan saja, tetapi lebih dari itu adalah tindakan yang menjadi *output* dari rasa cinta itu sendiri. Tanpa adanya “tindakan cinta” dalam wujud perhatian, tanggung jawab dan hormat, maka cinta bukanlah sesuatu yang dapat menjadi salah satu nilai dasar dalam Bela Negara. Demikian juga halnya dengan cinta Tanah Air, diwujudkan dengan menjaga tanah, pekarangan dan ruang wilayah Indonesia. Yang dilakukan dengan melestarikan lingkungan, ikut berkontribusi dalam kemajuan serta menjaga nama baik bangsa dan negara dengan sikap waspada terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.

Cinta Tanah Air, penerapannya juga dapat dilakukan dalam bentuk cinta kepada negara dan pemerintahan yang mengelola negara. Untuk mewujudkan hal tersebut pelaksana pemerintahan juga harus menunjukkan tindakan atau perilaku yang mencintai. Oleh sebab itu baik pemerintah maupun masyarakat harus saling mencintai, menerapkan sikap cinta Tanah Air, terutama bagi pemerintah sebagai penyelenggara upaya Bela Negara karena mempunyai fungsi sebagai contoh dan teladan masyarakat.

2.1.6.2 Sadar Berbangsa dan Bernegara

Sebagai warga negara secara individu atau kelompok, harus memiliki kesadaran bahwa hidup adalah pemberian TUHAN dalam kebersamaan dengan sesama manusia dan lingkungan. Setiap individu berada dalam kelompoknya, bangsanya dan negaranya, yang secara naluri akan mempertahankan keberadaan tersebut agar tetap eksis. Sadar akan berbangsa dan bernegara berarti mengerti akan adanya kelompok lain dan menyadari ada sistem yang mengatur hidup kebersamaan tersebut dan menghargainya. Tanpa adanya kesadaran akan berbangsa dan bernegara, tidak akan terbentuk sikap saling menghargai.

Dengan kesadaran akan berbangsa dan bernegara, akan muncul sikap untuk ingin bersatu, ikhlas menerima perbedaan demi kebersamaan. Sikap dan perilaku yang selalu ingin menumbuhkan rasa persatuan, sangat diperlukan untuk memperkuat kesemestaan pertahanan negara, dimana tindakan untuk membela negara akan lebih kuat jika dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh sumber daya yang ada. Dengan kata lain, bahwa kesadaran akan berbangsa dan bernegara akan menjadi kesadaran membela bangsa dan negara

2.1.6.3 Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara

Sebagai Ideologi negara, Pancasila merupakan falsafah atau pandangan hidup bangsa Indonesia yang sudah disepakati sejak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti diketahui, banyak paham ataupun ideologi yang ingin diterapkan dalam perjalanan kehidupan bangsa, namun tidak pernah dapat menggoyahkan Pancasila.

Setia kepada Pancasila bukan hanya sebutan sebagai sebuah kata, lebih dari pada itu, kelima sila dan nilai-nilai yang dikandung dalam Pancasila harus dapat menjadi dasar dan sumber segala tindakan dalam berbangsa dan bernegara. Setia kepada Pancasila berarti siap mempertahankannya sebagai Ideologi negara yang sudah disepakati bersama dan diamanatkan dalam konstitusi negara yaitu UUD 1945. Kemudian juga berarti setiap warga negara harus benar dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu disamping sebagai Ideologi negara yang harus dibela, nilai-nilai Pancasila itu sendiri merupakan dasar bagi penerapan kesadaran Bela Negara.

2.1.6.4 Relasi Berkorban untuk Bangsa dan Negara

Relasi berarti bersedia dengan ikhlas hati, tidak mengharap imbalan dan bukan karena paksaan, tetapi atas kesadaran dan kemauan sendiri. Relasi berkorban, merupakan sikap sedia berkorban tanpa syarat. Relasi berkorban untuk bangsa dan negara berarti bersedia mengorbankan milik sendiri, diri bahkan jiwa dan raga demi kepentingan bangsa dan negara. Pengertian ini bermakna langsung yaitu, relasi berkorban untuk membela negara. Contoh penerapan dalam kehidupan adalah, relasi berkorban waktu, harta, raga maupun jiwa dalam setiap kesempatan dan bidang kegiatan yang kita tekuni.

2.1.6.5 Kemampuan Awal Bela Negara

Membela negara bukan hanya sekedar berani tampil tetapi tidak mempersiapkan diri, yang hanya berpotensi menghasilkan kegagalan. Kemampuan awal ini mengandung semangat tinggi yang menjadi pendorong motivasi untuk mengisi diri dengan kemampuan pikiran, kejiwaan dan fisik. Kemampuan yang sarat dengan nilai-nilai karakter untuk selalu siap bersaing dalam bidang intelektual, membina kemampuan fisik dan kesehatan. Selalu berpikiran dan belaku positif dengan hati yang riang gembira, serta semangat pantang menyerah. Kemampuan awal Bela Negara juga untuk meningkatkan kepercayaan diri, yang menimbulkan perilaku siap sedia, mengisi diri sehingga mampu berdiri di atas kaki sendiri.

2.1.7 Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta

Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau disingkat dan lebih dikenal dengan Sishankamrata, adalah sistem pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa yang dimaksud dengan bersifat semesta adalah terlibatnya seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Dimana kesemestaan itu dipersiapkan secara dini dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut oleh pemerintah, untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Sesuai dengan teori sistem yang disebutkan oleh Gordon B. Davis dalam bukunya *Managemen Development*, mengatakan bahwa sistem adalah bagian-bagian yang secara bersama-sama berproses atau beroperasi untuk mencapai beberapa tujuan. Sishankamrata adalah dimana seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya merupakan komponen yang secara bersama-sama berproses atau dioperasikan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan.

Di dalam halaman 1 penjelasan atas UU No 3 Tahun 2002, mengenai prinsip-prinsip penyelenggaraan pertahanan negara pada poin no 2 disebutkan bahwa pembelaan negara dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Sehingga, tidak seorangpun warga negara boleh tidak ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan dengan undang-undang. Dimana mengandung pengertian bahwa upaya pertahanan negara harus berdasarkan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Selanjutnya pada halaman 3 disebutkan bagaimana penerapan usaha Bela Negara dalam Sishankamrata, yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Dengan penjelasan ini jelas bahwa

usaha Bela Negara merupakan bagian dari sumber daya manusia (karakter) yang merupakan salah satu komponen dari Sishankamrata.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang terkait dengan tema Bela Negara atau penerapan Bela Negara sesuai dengan judul penelitian ini. Kesimpulan-kesimpulan dan garis besar pada penelitian terdahulu yang membahas tentang Bela Negara atau penerapan Bela Negara, akan diuraikan/ dijelaskan menurut versi peneliti untuk dibandingkan dengan penelitian ini. Yang mana uraian dan perbandingan yang dilakukan diharapkan dapat mempertajam ataupun mengembangkan implementasi program Bela Negara untuk memperkuat Sishankamrata.

Dalam membahas penelitian terdahulu ini akan dilihat metode yang digunakan, maksud dan tujuannya, dan pendekatan serta teknik pengumpulan datanya. Beberapa penelitian terdahulu yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dkk (2021), dalam artikel yang berjudul "Penerapan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Penguat Sikap Bela Negara Bagi Siswa Sekolah Dasar". Penelitian ini bermaksud untuk membahas secara lebih mendalam tentang bagaimana pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan secara sistematis dapat mempengaruhi upaya bela negara yang dimiliki oleh siswa. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan datanya dengan kajian pustaka yang didapatkan melalui buku-buku referensi dan jurnal penelitian, berita online, situs online resmi, untuk dijadikan sebagai pendukung analisis. Referensi yang dipilih adalah buku-buku, jurnal, dan penelitian yang relevan dan berkaitan dengan penelitian mengenai pendidikan kewarganegaraan, Bela Negara, dan pendidikan sekolah dasar. Hasil penelitian

menjelaskan bahwa, penerapan pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat sikap Bela Negara siswa Sekolah Dasar, dilakukan dengan cara membantu siswa dalam memahami rasa nasionalisme untuk mencintai negara. Kemudian memahami akan keberagaman yaitu, tidak terdiri dari satu jenis bahasa, suku, etnis, agama saja dan sebagainya. Selanjutnya perlu metode yang kognitif dan efektif, yaitu pola belajar yang variatif dan memberi contoh dalam sikap dan perilaku. Dimana sebagai peran kontrol dalam memberikan pengetahuan untuk anak dalam usia pendidikan sekolah dasar (Dewi et al., 2021). Dalam penelitian tersebut dijelaskan tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan yaitu untuk memperkenalkan secara dini bagaimana hidup berbangsa dan bernegara, bagaimana menyikapi perbedaan, bagaimana semestinya pemimpin dan rakyat dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan diberi pengetahuan dan teladan sejak dini dan berkelanjutan, akan terpatrit di dalam jiwa dan raganya pentingnya membela negara karena mereka mencintainya.

- b. Penelitian yang dilakukan (Rahayu et al., 2019), dengan judul artikelnya, "Kesadaran Bela Negara Pada Mahasiswa". Penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana kesadaran Bela Negara pada mahasiswa, ditinjau dari lima nilai-nilai dasar Bela Negara. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan angket untuk menganalisis nilai mean yang diperoleh terhadap kegiatan yang telah ditentukan. Hasil penelitian menggambarkan adanya kekurangan dalam penerapan kesadaran Bela Negara yaitu, kepedulian yang kurang terhadap keamanan lingkungan kampus, kegiatan olah raga dan kesenian kurang diminati untuk membawa nama baik kampus, kepentingan pribadi masih lebih dominan, adanya kecenderungan golput atau tidak memilih

- pada pemilu dan minat yang kurang pada kegiatan resimen mahasiswa (menwa) dan keinginan menjadi militer. Dalam penelitian tersebut akan menimbulkan pertanyaan, apakah Bela Negara sudah diterapkan dari sejak pendidikan dasar, mengapa setelah dewasa baru “digalakkan” setelah tingkat perguruan tinggi? Ada dua kemungkinan jawabannya, yaitu tidak pernah mengetahui apa itu Bela Negara atau tahu, tetapi tidak melihat itu dilakukan oleh para pendidik bahkan orang tua.
- c. Penelitian oleh Syarifudin Tippe (2013) dalam artikel yang berjudul “Implementasi Kebijakan Bela Negara di Perbatasan: Studi Kasus di Propinsi Papua”. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa tujuan penelitian adalah untuk mengasistensi cara pendekatan dalam menerapkan Bela Negara dengan memantapkan nilai nasionalisme dan patriotisme bagi semua pihak yang terlibat guna mendukung pemecahan masalah di Papua. Dimana secara akademis mengembangkan wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan Papua. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis komparatif konstan, dimana teori dikembangkan atau dihasilkan melalui penelitian dan pengumpulan data pada wilayah penelitian. Hasil dari penelitian menyebutkan ada tiga tema yang dihasilkan, yang pertama adanya penolakan masyarakat akibat pola/cara yang dilakukan pemerintah dianggap tidak mensejahterakan masyarakat. Dimana masyarakat seperti dipaksa mengikuti politik pemerintah, sementara situasi yang ada, masyarakat belum siap mengikuti “irama langkah”. Yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat Papua yang memiliki sensitivitas tinggi tentu amat relevan jika didekati strategi kebudayaan yaitu melalui ilmu antropologi sosial budaya dan ini belum dilakukan

maksimal. Yang ketiga penciptaan keamanan di perbatasan jangan merupakan kasuistis saja, tetapi harus secara umum dan merata. Dari ketiga tema tersebut, Bela Negara harus diwujudkan dalam membentuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan program-program yang memperhatikan kebudayaan setempat serta keamanan masyarakat. Berbangsa dan bernegara adalah bagaimana cara menarik orang untuk bersimpati dengan memberikan contoh, menghargai kebudayaan lokal yang merupakan dasar yang utama (Tippe, 2013).

- d. Penelitian yang dilakukan oleh Supriyono dkk (2019) dalam artikel yang berjudul, "Pentingnya Penanaman Nilai-nilai Kebangsaan Bagi Masyarakat Pesisir Pulau Terdepan sebagai Upaya Keikutsertaan Warga Negara dalam Bela Negara". Adapun tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh dan pentingnya penanaman nilai-nilai kebangsaan bagi masyarakat pesisir pulau terluar sebagai upaya keikutsertaan warga negara dalam bela negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan dimana pendekatan kesejahteraan bagi masyarakat perlu diutamakan sebelum menanamkan nilai-nilai kebangsaan, dan dengan penanaman nilai-nilai kebangsaan akan menumbuhkan kesadaran Bela Negara melalui sadar pertahanan sebagai efek pencegahan bagi yang ingin mengganggu kedaulatan Indonesia (Supriyono et al., 2019). Pendekatan kesejahteraan adalah hal yang mutlak dilakukan oleh pemerintah yang peduli kepada rakyatnya. Sehingga sebagai tugas utama, pendekatan kesejahteraan juga dijadikan pemacu kepada masyarakat untuk mau mencintai Tanah Air.

- e. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Umra (2019) dalam artikel yang berjudul “Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme atau Militerisasi Warga Negara”. Tujuan dari penelitian ini adalah memberi masukan sebagai solusi dalam penerapan program Bela Negara dalam pendidikan, yaitu dengan mengintegrasikan program pendidikan kesadaran Bela Negara dan pembangunan karakter bangsa ke dalam mata pelajaran baik intra maupun ekstra kurukuler. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis dengan pendekatan pola pikir deduksi untuk menelaah konsep, norma hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan penerapan konsep Bela Negara. Hasil penelitian menggambarkan bahwa penerapan Bela Negara yang dilaksanakan lebih kepada menyiapkan warga negara secara militer dalam hal ini sebagai komponen cadangan, bukan menitikberatkan pada nonfisik untuk membentuk karakter (Umra, 2019). Penelitian tersebut menyarankan agar porsi penerapan Bela Negara lebih besar untuk membentuk karakter bangsa.

Dari penelitian-penelitian di atas dapat diketahui ada persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan ini. Persamaan kelima penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas tentang implementasi kesadaran Bela Negara dan rencana program yang dapat dijadikan referensi atau masukan untuk lebih tajam dan komprehensif. Sedangkan perbedaan, terdapat pada fokus penelitian dan metode pendekatan yang digunakan. Untuk melihat lebih jelas dan persamaan dan perbedaan, seperti pada tabel berikut:

Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu

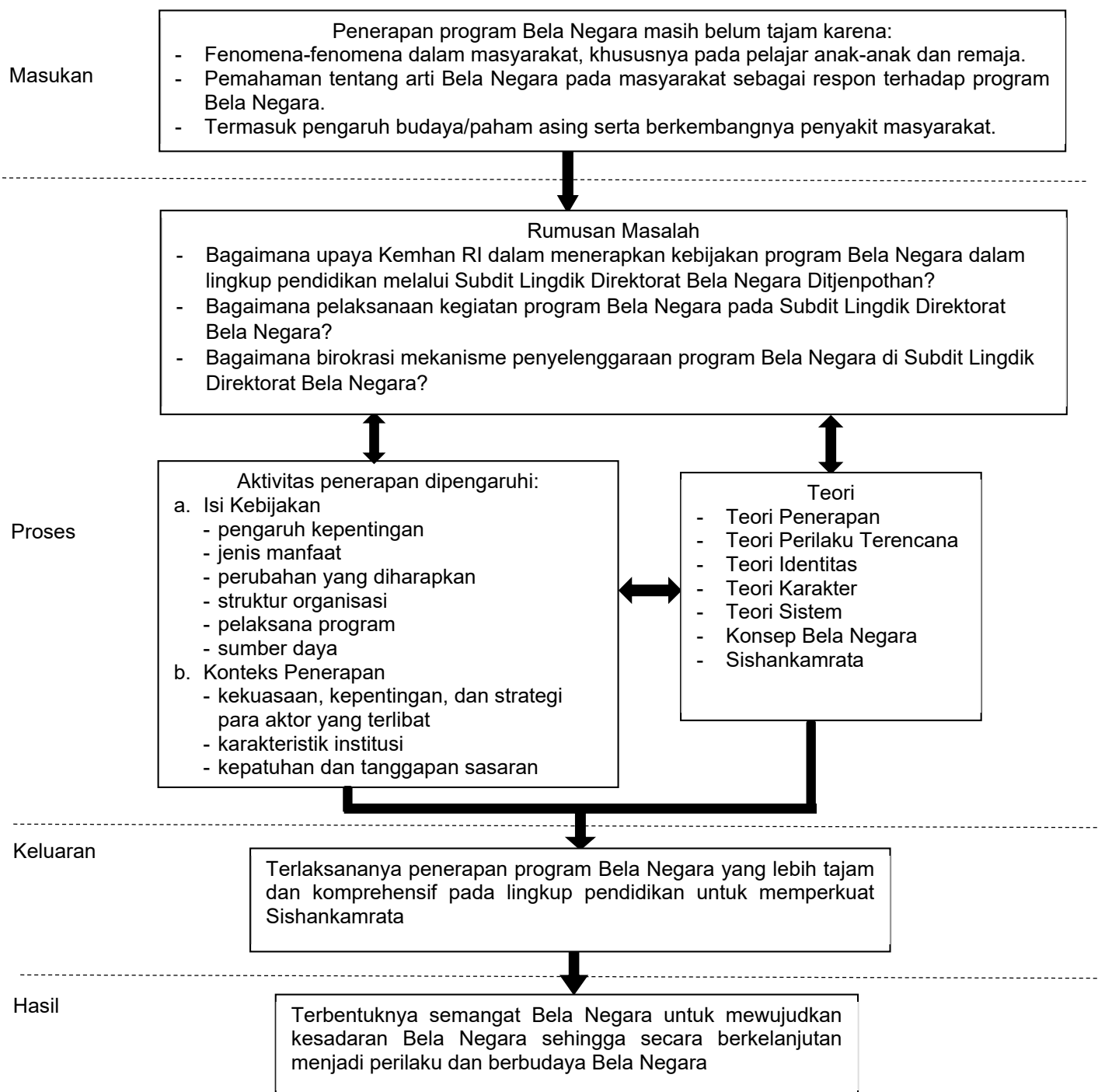
No	Peneliti	Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Dewi dkk (2021)	Penerapan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Penguat Sikap Bela Negara Bagi Siswa Sekolah Dasar	Penerapan pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat sikap Bela Negara siswa Sekolah Dasar, dilakukan dengan membantu siswa dalam memahami rasa nasionalisme untuk mencintai negara. Perlu metode yang kognitif dan efektif, yaitu pola belajar yang variatif dan memberi contoh dalam sikap dan perilaku	<ul style="list-style-type: none"> - Metode diskriptif kualitatif - Penajaman program Bela Negara sejak dini, baik teori/ praktek 	<ul style="list-style-type: none"> - Subjek dan objek penelitian - Lokasi dan cakupan area penelitian
2	Rahayu dkk (2019)	Kesadaran Bela Negara Pada Mahasiswa	Adanya kekurangan dalam penerapan kesadaran Bela Negara yaitu, kepedulian yang kurang terhadap keamanan lingkungan kampus. Kegiatan olah raga dan kesenian kurang diminati untuk membawa nama baik kampus. Kepentingan pribadi masih lebih dominan. Adanya kecenderungan golput atau tidak memilih pada pemilu dan Kurangnya minat pada kegiatan resimen mahasiswa (menwa) dan keinginan menjadi militer.	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang penerapan kesadaran Bela Negara 	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan angket - Subjek, objek dan area penelitian
3	Syarifudin Tippe (2013)	Implementasi Kebijakan Bela Negara di Perbatasan: Studi Kasus di Propinsi Papua	Adanya penolakan masyarakat akibat pola/cara yang dilakukan pemerintah dianggap tidak mensejahterakan masyarakat, dimana merasa dipaksa mengikuti politik pemerintah. Pemberdayaan masyarakat Papua yang memiliki sensitivitas tinggi tentu amat relevan jika didekati strategi kebudayaan yaitu melalui ilmu antropologi sosial budaya dan ini belum dilakukan maksimal. Keamanan perbatasan jangan merupakan kasuistis saja, tetapi harus secara umum dan merata	<ul style="list-style-type: none"> - Metode yang digunakan deskriptif kualitatif - Bagaimana penajaman program Bela Negara dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> - Subjek, objek dan area penelitian
4	Supriyono dkk (2019)	Pentingnya Penanaman Nilai-nilai Kebangsaan Bagi Masyarakat Pesisir Pulau Terdepan sebagai Upaya Keikutsertaan Warga Negara dalam Bela Negara	Pendekatan kesejahteraan bagi masyarakat perlu diutamakan sebelum menanamkan nilai-nilai kebangsaan, dan dengan penanaman nilai-nilai kebangsaan akan menumbuhkan kesadaran Bela Negara melalui sadar pertahanan sebagai efek pencegahan bagi yang ingin mengganggu kedaulatan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Metode deskriptif kualitatif - Bagaimana menumbuhkan kesadaran Bela Negara 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan dalam mengawali kesadaran Bela Negara - Subjek, objek dan area penelitian

5	Umra (2019)	Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme atau Militerisasi Warga Negara	Menggambarkan bahwa penerapan Bela Negara yang dilaksanakan lebih kepada menyiapkan warga negara secara militer dalam hal ini sebagai komponen cadangan, bukan menitikberatkan pada nonfisik untuk membentuk karakter	<ul style="list-style-type: none">- Metode yang digunakan deskriptif kualitatif- Titik berat pada non fisik, yaitu membentuk karakter Bela Negara	<ul style="list-style-type: none">- Subjek, objek dan area penelitian
---	-------------	---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dari penelitian ini adalah bahwa Program Bela Negara dibuat oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pertahanan. Dimana program ini dibuat berdasarkan kecintaan akan Tanah Air dengan referensi nilai-nilai luhur bangsa lainnya. Nilai-nilai dasar dalam Bela Negara diharapkan akan dapat memperkuat sistem pertahanan negara, yaitu sebagai fondasi dari Sishankamrata. Implementasi Program Bela Negara belum terlaksana dengan baik, karena makin maraknya fenomena-fenomena dalam masyarakat, khususnya pada pelajar anak-anak dan remaja. Kemudian masih kurangnya pemahaman tentang arti Bela Negara pada masyarakat, juga adanya akibat negatif dari pengaruh budaya/ paham asing serta berkembangnya penyakit masyarakat.

Terkait hal-hal yang dijadikan sebagai input tersebut, peneliti ingin melihat dari sisi implementasi kebijakan program Bela Negara pada Direktorat Bela Negara Ditjenpothan, khususnya dalam lingkup pendidikan yang dilaksanakan oleh Subdit Lingdik. Dimana akan menganalisis tugas dan fungsi Subdit Lingdik dengan menggunakan variabel yang ada pada model implementasi kebijakan Grindel. Kemudian dengan menggunakan teori-teori yang ada diharapkan hasil analisa dapat menjawab pertanyaan pada rumusan permasalahan. Selanjutnya hasil analisa dari permasalahan yang ada diharapkan dapat menjadi sumbang saran untuk mempertajam pola usaha Bela Negara, sehingga menjadi berdaya guna dalam implementasinya. Gambaran kerangka berpikir yang telah dibuat adalah sebagai berikut:



Gambar 2 2 Kerangka Berpikir